JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Author:
Rizen Chariswan Grace Hura[1]
Hendra Saputra[2]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email:
rizenhura@gmail.com
hendrasaputra@dosen.pancabudi.ac.id

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendapatan pemerintah daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Belanja modal merupakan komponen investasi publik yang penting bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset tetap daerah. Pemahaman mengenai hubungan antara pendapatan dan belanja modal menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan prioritas investasi publik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2020–2024. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan berganda, serta analisis deskriptif untuk menggambarkan tren pendapatan dan belanja modal. Variabel independen mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sementara variabel dependen adalah Belanja Modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan (baik PAD maupun DAU) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan pendapatan daerah sebesar satu satuan cenderung diikuti oleh peningkatan belanja modal. Namun, tingkat elastisitas belanja modal terhadap pendapatan menunjukkan bahwa tidak semua peningkatan pendapatan dialokasikan sepenuhnya untuk belanja modal. Temuan ini mengindikasikan adanya pertimbangan prioritas dan kebijakan alokasi anggaran yang kompleks dalam pengambilan keputusan belanja modal di tingkat daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

1. Pendahuluan

Otonomi daerah yang mulai diberlakukan secara luas di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangannya sendiri. Salah satu konsekuensi utama dari otonomi daerah adalah meningkatnya peran pemerintah provinsi dalam mengelola pendapatan

daerah dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah—baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (seperti Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK), maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah—menjadi dasar kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan. Di sisi lain, belanja modal merupakan salah satu komponen belanja yang sangat penting karena diarahkan untuk pembentukan aset tetap daerah (seperti infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, dan aset produktif lainnya) yang manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang.

Secara teoritis, semakin besar pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, semakin besar pula potensi alokasi anggaran untuk belanja modal sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya, peningkatan pendapatan daerah tidak selalu diikuti secara proporsional oleh peningkatan belanja modal, karena pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan belanja lainnya, terutama belanja operasi (gaji pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial) yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, antara lain di sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Potensi tersebut tercermin dalam kemampuan Provinsi Sumatera Utara dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola transfer dari pemerintah pusat. Data APBD beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami tren peningkatan, baik dari sisi PAD maupun dari dana pusat. Namun demikian, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah tidak selalu menunjukkan pola peningkatan yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut.

Di sisi lain, berbagai indikator pembangunan di Sumatera Utara, seperti kualitas infrastruktur jalan, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota, masih menunjukkan adanya kesenjangan dan kebutuhan investasi publik yang besar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah peningkatan pendapatan daerah telah dimanfaatkan secara optimal untuk memperbesar porsi belanja modal yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan publik, atau justru lebih banyak terserap untuk belanja rutin/operasional yang kurang produktif dalam jangka panjang.

Secara empiris, sejumlah penelitian tentang keuangan daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, artinya daerah yang mampu meningkatkan PAD cenderung meningkatkan alokasi belanja modal. Namun, ada juga temuan yang menunjukkan bahwa dominasi dana transfer dari pusat atau tingginya komponen belanja pegawai menyebabkan sebagian besar tambahan pendapatan tidak diarahkan secara optimal ke belanja modal. Perbedaan hasil penelitian ini membuka ruang untuk melakukan kajian lebih lanjut pada konteks daerah tertentu, termasuk Provinsi Sumatera Utara.

2. Studi Literatur

Teori Keuangan Publik menjelaskan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dan mengalokasikannya dalam bentuk belanja untuk menyediakan barang dan jasa publik serta mencapai tujuan pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989; Rosen, 2013). Pendapatan daerah, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sementara itu, belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang digunakan untuk membiayai pembentukan aset tetap pemerintah daerah, seperti infrastruktur jalan, jembatan, bangunan gedung, dan sarana publik lain, yang manfaatnya bersifat jangka panjang.
Dalam kerangka fungsi alokasi keuangan publik, peningkatan pendapatan daerah secara teoritis akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada belanja yang bersifat produktif, terutama belanja modal. Dengan demikian, berdasarkan Teori Keuangan Publik, dapat diasumsikan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Landasan teoritis ini menjadi dasar bagi penelitian untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka APBD yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan belanja modal Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan sumber perolehannya, data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi terkait. Ditinjau dari segi waktu, penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024, sehingga memungkinkan untuk menganalisis perkembangan dan pengaruh pendapatan terhadap belanja modal dari waktu ke waktu.

3.2 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis Deskriptif, digunakan untuk menggambarkan perkembangan pendapatan daerah dan belanja modal Provinsi Sumatera Utara selama periode penelitian, melalui penyajian tabel, grafik, serta perhitungan rata-rata, nilai maksimum, minimum, dan pertumbuhan.
2. Analisis Regresi Linier (sederhana atau berganda), digunakan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal. Dalam regresi linier sederhana, variabel independen adalah pendapatan daerah total, sedangkan dalam regresi linier serdehana variabel independen mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja modal sebagai variabel dependen.
3. Uji Signifikansi yang terdiri dari:
    - Uji t (parsial) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel pendapatan terhadap belanja modal.

4. Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variasi belanja modal yang dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dalam model regresi yang digunakan.

4. Hasil

4.1 Analisis

Tabel 4.1 Uji secara Parsial (t)

*S*umber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	412.625	16.336		25.258	.000
	PAD	-.948	.079	-31.131	-11.936	.000

a. Dependent Variable: belanja modal

Dari hasil uji secara parsial (uji t) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel independen. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan (α = 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, setiap perubahan pada variabel independen memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perubahan variabel dependen dalam model yang diuji.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.953[a]	.908	.900	78.38123	.908

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: belanja modal

Dari uji yang dilakukan secara koefisien determinasi dapat dilihat bahwa pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependen sebesar 90 persen, sisa nya 10 persen dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

1. Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi pajak daerah tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, melainkan lebih diarahkan pada pembiayaan belanja operasional dan belanja rutin pemerintah daerah. Setiap peningkatan kontribusi pajak daerah justru diikuti penurunan belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Padang (2023) menyatakan bahwa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan daerah sendiri dan dana penyeimbang sebagian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

1. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal, karena pajak daerah lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains.

Referensi

Arifah, S., Sari, A. K., & Nst, D. A. D. (2026). The Influence Of Regional Original Revenue On Capital Expenditure In Regencies/Cities Of North Sumatera. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, *5*(1), 303-308.

Faried, A. I., Sos, S., SP, M., & Sos, D. S. S. S. (2017). Keterhubungan pola pengambilan keputusan efektif, struktur dan budaya organisasi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *IRAWAN, SE, M. Si. dan Drs. ANWAR SANUSI, M. Si……..*, *8*

Fred R. David, 2018. Manajemen Strategi. Indeks Gramedia. Jakarta

Hadiyanto, D. W. (2022). Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Selama Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Binjai Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Hasen, dan Mowen, 2016. Management Accounting. Salemba 4. Jakarta.

Hasana, N. A., & Hamdani, G. 2023. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Finansial terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(7).

Ismail, Hanif, dan Darsono Prawironegoro, 2019 Sistem Pengendalian Manajemen, konsep dan Aplikasi. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Kaplan, R, S dan Norton, D, P, 2018. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Erlangga. Jakarta.

Maisyarah, R. (2018). Analysis of the determinants competition oligopoly market telecommunication industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.

Made, A., & Ak, C. A. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Di Kantor Dppkad Kabupaten Situbondo).

Mulyadi, 2014. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yokyakarta.

Mulyadi, 2017. Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan. Edisi kedua. Salemba . Jakarta.

Mahsun, 2018. Metode Penelitian. Duta Wacana University Press. Yogyakarta

Pardede, Pontas M., 2015. Manajemen Operasi dan Produksi: Teori, Model, dan Kebijakan. Edisi Pertama: Andi. Yogyakarta.

Rioni, Y. S. (2020). ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT: Yunita Sari Rioni; Teuku Radhifan Syauqi. *Jurnal Perpajakan*, *1*(2), 28-37.

Sari, A. K., & Saputra, H. (2023, December). The Influence of Supply Chain Management on Company Performance (Literature Study). In *International Conference on Sciences Development and Technology* (Vol. 3, No. 1, pp. 88-90).

Sebayang, S. A., Daulay, M. T., Maisyarah, R., Shihab, M. W., & Gulo, A. J. (2025). Impact of energy transformation on economic productivity and environmental sustainability in toba-asahan, indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 15(1), 180-189.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

Sihombing, A., Ranie, Z. A., & Kaputama, K. A. S. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Wilayah Kota Binjai.

Sedamaryanti, 2018. Manajemen Strategi. Refika Aditama. Bandung.

Watubun, J. S., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Studi di kantor DPPKAD kabupaten situbondo). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).